

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sekiranya laporan ini jauh belum sempurna oleh sebab itu kami juga butuh masukan dan saran agar lebih menyempurnakan laporan kinerja ini akan diterima dengan ucapan terima kasih.

Tobelo, 1 Maret 2024

Kepala Badan Kesbangpol



Drs. ANWAR S. KABALMAY

PEMBINA Tk.I IV/b
NIP.196802021988031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik dalam hal ini mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN–RI) Nomor : 239/IX/8/2003. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Halmahera Utara **“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA UTARA MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PROFESIONAL DILANDASI KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN”**

Visi tersebut diwujudkan dengan misi pembangunan yang ditawarkan sebagai penjabaran Visi tersebut antara lain :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar;
3. Mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi kekayaan alam yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta mengurangi angka kemiskinan.

Demi meningkatkan pelaksanaan tugas yang berdaya guna, dan untuk lebih memantapkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai konsekuensi dari pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada publik atau kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah tentang apa yang telah dilaksanakan dalam tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan baik keberhasilan maupun kegagalan, dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara mengacu pada Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tupoksi lembaga teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara, memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d. Pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik

dalam negeri.

- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkungan kantor dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran kinerja, dengan rata-rata capaian sebesar 61,37% di tahun 2024. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Kata Pengantar
Ikhtisar eksekutif
Daftar Isi
Daftar table

BAB I

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pembentukan OPD Badan Kesbangpol
- 1.3. Susunan Organisasi Badan Kesbangpol
- 1.4. Keragaman SDM Badan Kesbangpol

BAB II

- 2.1. Rencana Strategi
- 2.2. Rencana Kinerja

BAB III

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Efisiensi Program Dan Pendanaan

BAB IV

Penutup

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam mengevaluasi pelaksanaan rencana yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat dan tepat.

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Kinerja (*Performance Plan*) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terfokus.

Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, politik ketentraman ketertiban, kenyamanan lingkungan dan kesatuan bangsa serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi masalah sosial dan politik.

Untuk menyusun Laporan Kinerja, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, mengacu pada Renstra Perubahan (RENSTRA-P) tahun 2016-2021 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Badan Kesbangpol melakukan Penyesuaian Program dan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Dan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.2. PEMBENTUKAN OPD;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai implementasi Peraturan Pemerintah No-mor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berubah nomenkaltur yang sebelumnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Tugas Pokok dan Fungsi memberikan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan politik ber-dasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d. Pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkungan kantor
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1 Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 40 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas

Pokok Dan Fungsi Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara berada dalam lingkup Pemerintah Daerah beralamat di jalan Kawasan Pemerintahan No. 1 A Kantor Bupati Tobelo.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a. Tugas dan Fungsi ;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
- e. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
- h. Pelaksanaan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan di wilayah kabupaten;
- i. Pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- j. Pelaksanaan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, antar daerah serta

keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;

- k. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah kabupaten;
- l. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang undangan di wilayah kabupaten;
- m. Pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- n. Pelaksanaan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah kabupaten;
- o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
- p. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah kabupaten;
- q. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
- r. Pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- s. Pelaksanaan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur dibidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- t. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
- u. Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kabupaten;
- v. Pelaksanaan pemantauan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemantauan

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Presiden RI di wilayah Kabupaten;

- w. Pelaksanaan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
- x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

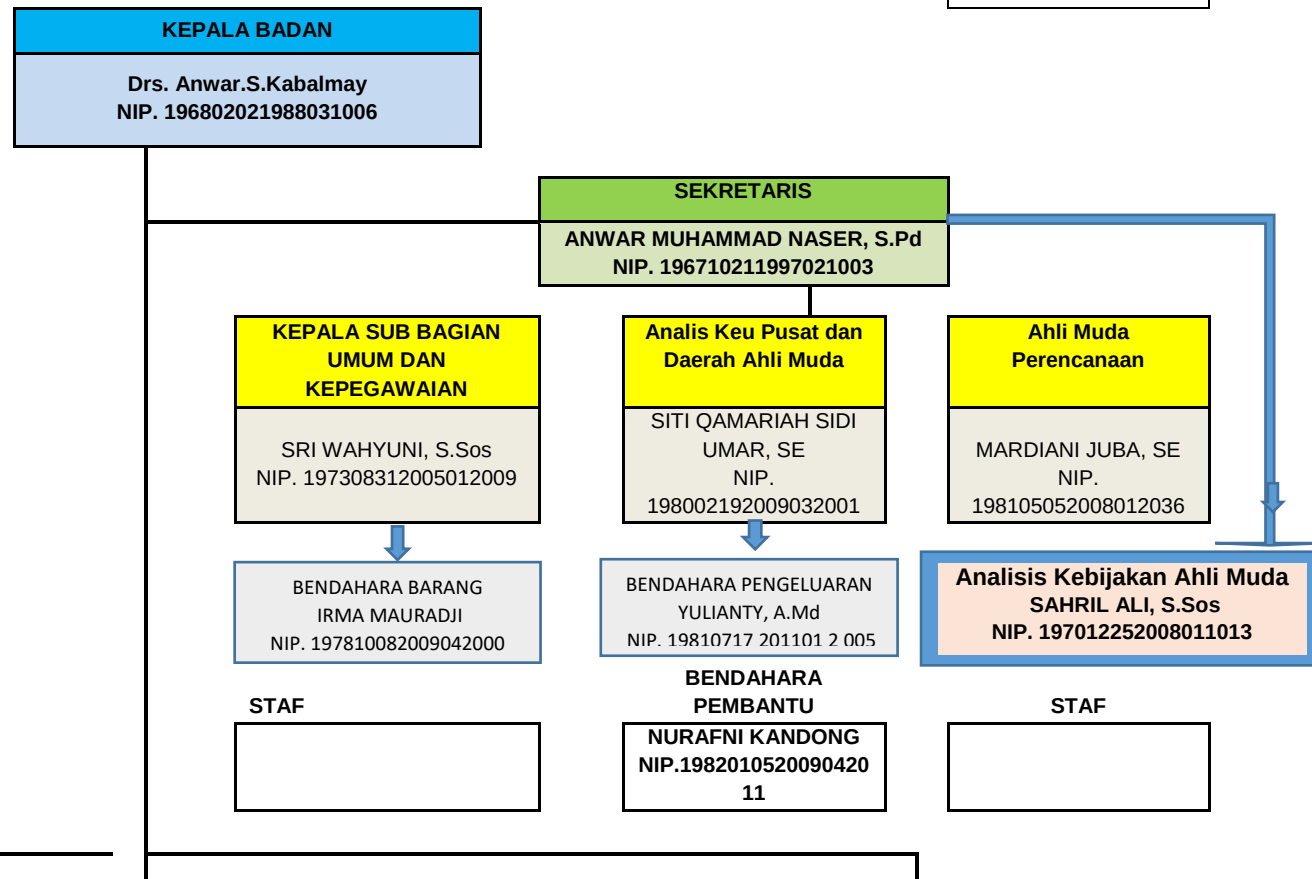
1.3. SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Struktur organisasi (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang digambarkan berdasar-kan Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Utara No:8/2016 yang merupakan penjabaran ter-hadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :



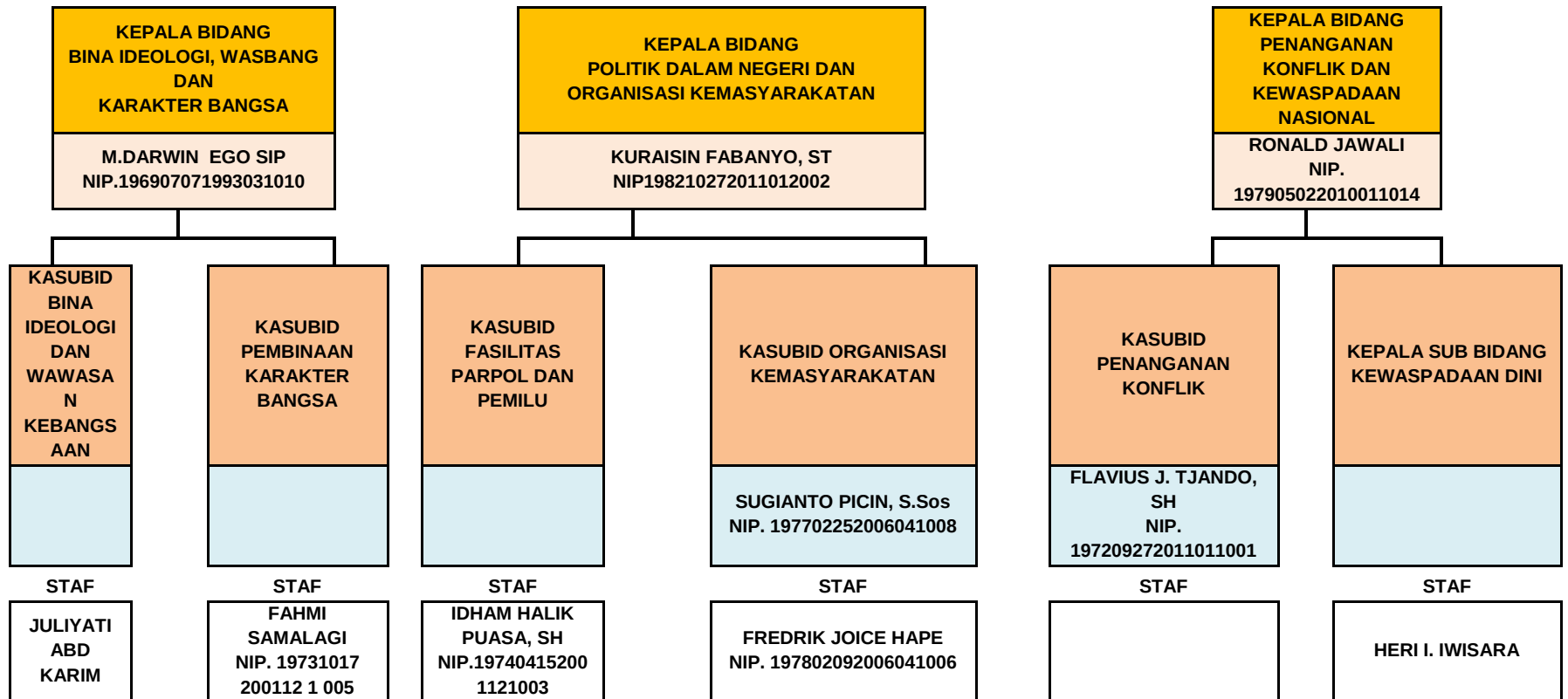
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022

Perda Halut No : 8/2016



LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024



I. KEPALA BADAN

II. SEKRETARIS, yang membawahi jabatan Struktural dan jabatan Fungsional Umum :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah
- c. Ahli Muda Perencanaan
- d. Analisis kebijakan Ahli Muda

III. KEPALA BIDANG BINA IDIOLOGI WASBANG DAN KARAKTER BANGSA, yang membawahi :

- a. Kepala Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Kepalan Sub Bidang Pembinaan Karakter bangsa;

IV. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI MASYARAKAT, yang membawahi :

- a. Kepala Sub Bidang Fasilitas Parpol dan Pemilu;
- b. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

V. KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN, yang membawahi :

- a. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik;
- b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini;

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan, kemudian masing-masing kasubid dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

1.4. KERAGAMAN (SDM) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

1.4.1. Susunan Kepegawaian;

Berdasarkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Jabatan Struktural;

Berdasarkan data pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab.Halmahera Utara Tahun 2023 berjumlah 17(tuju belas) Orang pegawai Negeri Sipil (PNS) 3 orang diantaranya menduduki jabatan fungsional. Pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara, yang dapat di klarifikasi menurut tingkat Pendidikan, Pangkat, Golongan Ruang, dan Jabatan serta Pendidikan Penjenjangan yakni :

1. Jabatan Eselon II yang di kepalai oleh Kepala Badan (KABAN)
2. Jabatan Eselon III yang di kepalai oleh Sekretaris dan Kepala Bidang
3. Jabatan Eselon IV yang di kepalai oleh Kasubbag/Kasubbid
4. Jabatan fungsional Umum

Para pejabat yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV (Empat) sebanyak (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan 3 (tiga) orang pegawai diantaranya menduduki jabatan fungsional Umum. kemudian yang menduduki jabatan strukktural Eselon III (tiga) sebanyak 4 (empat) orang pegawai dan yang menduduki jabatan Eselon II sebanyak 1 (satu) orang yaitu Kepala Badan (KABAN).

Dalam komposisi jabatan Eeselon IV, III dan II pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara sebagian belum terisi secara keseluruhan.

b. Jabatan Fungsional;

jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta melakukan evaluasi kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik maka jabatan pegawai yang menduduki seperti pada table 1.1 betiku ini :

❖ Pegawai yang menduduki jabatan pada Badan Kesbangpol

Tabel 1.1

**JABATAN DAN ESELON PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH	KET.
KEPALA BADAN	II b	1 Orang	
SEKRETARIS BADAN	III a	1 Orang	
PERENCANAAN AHLI MUDA	FUNGSIONAL	1 Orang	
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	FUNGSIONAL	1 Orang	
ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	FUNGSIONAL	1 Orang	
KASUBAG TENAGA ADMINISTRASI UMUM	IV	1 Orang	
KEPALA BIDANG BINA IDIOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA	III	1 Orang	
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS	III	1 Orang	
KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL	III	1 Orang	
KEPALA SUB BIDANG BINA IDIOLOGI DAN WASBANG	-		BELUM TERISI
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN KARAKTER BANGSA	-		BELUM TERISI
KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PARPOL DAN PEMILU	-		BELUM TERISI
KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	IV	1 Orang	
KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK	IV	1 Orang	
KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI, ANALISIS EVALUASI INFORMASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS	IV	1 Orang	

❖ Menurut Kepangkatan :

Tabel 1.2

GOLONGAN	JUMLAH	
GOLONGAN IV	3	ORANG
GOLONGAN III	11	ORANG
GOLONGAN II	4	ORANG

❖ Pendidikan PNS :

Tabel 1.3

PENDIDIKAN	JUMLAH	
S2	2	ORANG
SI	12	ORANG
DEPLOMA TIGA	1	ORANG
SMA	3	ORANG

❖ Pendidikan Tenaga Kontrak

Tabel 1.4

PENDIDIKAN	JUMLAH	
D III	1	ORANG
SMA	4	ORANG

1.4.2. Fasilitas Pendukung pada Badan Kesbagpol

Dalam rangka mendukung kerja dan tugas Badan Kesbangpol dibutuhkan sarana dan Prasarana yang memadai untuk itu ada beberapa asset yang bergerak dan tidak

bergerak pada Badan kesatuan Bangsa Dan Politik seperti yang terlihat pada table berikut ini :

Tabel 1.5
Sarana Yang Dimiliki Badan Kesbangpol

URAIN	VOLUME	SATUAN
LAPTOP/KOMPUTER	2	UNIT
PRINTER	2	UNIT
HARDISK	1	UNIT
INFOKUS	-	UNIT

Tabel 1.6
Aset Bergerak Yang Dimiliki Badan Kesbangpol

NAMA ASET	VOLUME	TAHUN PENGADAN
SEPEDA MOTOR	2	2017

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

Tabel 1.7
Aset Tidak bergerak Yang Dimiliki Badan Kesbangpol

NO	Jenis Barang Yang Dibeli	SPK/ Perjanjian/ Kontrak		DPA/ SP2D/ Kwitansi		Jumlah			Dipergunakan Pada Unit	Ket
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyaknya Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	HANDYCAM	29 Agustus 2022	027/ 310/ NP/ 2022	09 September 2022	400/ LS.BJ/ 2022	1	4.530.000	4.530.000		Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini
2	CAMERA ELECTRONIC	29 Agustus 2022	027/ 310/ NP/ 2022	09 September 2022	400/ LS.BJ/ 2022	1	4.530.000	4.530.000		Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini
3	PRINTER	29 Agustus 2022	027/ 310/ NP/ 2022	09 September 2022	400/ LS.BJ/ 2022	2	4.896.000	9.792.000		Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini
4	HARDISK EXTERNAL	29 Agustus 2022	027/ 310/ NP/ 2022	09 September 2022	400/ LS.BJ/ 2022	1	1.536.000	1.536.000		Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini
5	LAPTOP	29 Agustus 2022	027/ 310/ NP/ 2022	09 September 2022	400/ LS.BJ/ 2022	3	10.512.000	31.536.000		Sekretariat dan Bidang Bina Ideologi dan Wasbang
6	MOUSE USB	29 Agustus 2022	027/ 310/ NP/ 2022	09 September 2022	400/ LS.BJ/ 2022	4	172.000	688.000		Sekretariat dan Bidang Bina Ideologi dan Wasbang

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

7	USB FLASHDI SK	29 Agustu s 2022	027/ 310/ NP/ 2022	09 September 2022	400/ LS.BJ/ 2022	9	104.00 0	936.000		Sekretariat dan Bidang Bina Ideologi dan Wasbang
JUMLAH TOTAL								53.548.000		

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

Tabel 1.8
Aset Tidak Bergerak Yang Dimiliki Badan Kesbangpol

N O	MASUKAN DATA INFENTARISASI ASET	NAMA ASET YANG DIKUASAI	JUMLAH TOTAL ASET YANG DIKUASAI (Rp)	NAMA ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN	JUMLAH ANGGARAN ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN (Rp)	TAHUN PEMBELIA N	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kursi lipat Olympic			Kursi lipat Olympic	925.400	2006	
2	Kursi lipat	Kursi lipat	80.500			2006	
3	Kursi lipat	Kursi lipat	161.000			2006	
4	Sepeda motor Yamaha RX			Sepeda motor Yamaha RX	8.500.000	2007	
5	Mesin Ketik Manual Standar			Mesin Ketik Manual Standar	1.400.000	2007	
6	Brand Kas	Brand Kas	3.150.000			2007	
7	P.C Unit/ Computer PC			P.C Unit/ Computer PC	25.000.000	2008	
8	Weapon dan Metal Detektor	Weapon dan Metal Detektor	95.000.000	Weapon dan Metal Detektor		2008	
9	Unit Transceiver SSB Portable	Unit Transceiver SSB Portable	106.000.000			2008	
10	Lemari Kayu	Lemari Kayu	6.000.000			2013	
11	Meja Kayu rotan	Meja Kayu rotan	1.500.000			2013	
12	Kursi Kerja	Kursi Kerja	2.500.000			2013	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

13	Sofa	Sofa	6.000.000			2013	
14	Lap Top Dell	Lap Top Dell	12.500.000			2013	
15	Gedung Pos Jaga Parmanen	Gedung Pos Jaga Parmanen	114.000.000			2013	
16	Sepeda Motor Yamaha	Sepeda Motor Yamaha	20.830.000			2014	
17	Meja Rapat	Meja Rapat	12.500.000			2014	
18	Kursi Rapat	Kursi Rapat	11.451.000			2014	
19	Kursi Rapat	Kursi Rapat	1.049.000			2014	
20	Kursi Kerja	Kursi Kerja	2.500.000			2014	
21	Handy cam	Handy cam	10.000.000			2014	
22	PC Unit	PC Unit	15.000.000			2014	
23	Printer Epson	Printer Epson	1.725.000			2014	
24	Printer Canon	Printer Canon	1.725.000			2014	
25	Meja Kerja Pj Eselon III	Meja Kerja Pj Eselon III	1.500.000			2014	
26	Lemari Arsip	Lemari Arsip	3.000.000			2014	
27	Sepada Motor Yamaha Zupiter MX	Sepada Motor Yamaha Zupiter MX	19.950.000			2015	
28	Mobil PicUp Mitsubsihi	Mobil PicUp Mitsubsihi	423.653.000			2015	
29	Meja Komputer	Meja Komputer	6.000.000			2015	
30	Kursi Kerja	Kursi Kerja	2.700.000			2015	
31	Meja Kerja	Meja Kerja	15.000.000			2015	
32	Lemari Arsip	Lemari Arsip	15.000.000			2015	
33	PC Unit	PC Unit	7.500.000			2015	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

34	Hardisk	Hardisk	500.000			2015	
35	Flash Disk	Flash Disk	800.000			2015	
36	Mouse	Mouse	200.000			2015	
	TOTAL		919.474.500		35.825.400		

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategi

Rencana Tahunan SKPD adalah upaya mewujudkan visi misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang bermula pada pelaksanaan visi misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk satu tahun, yang dilaksanakan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan secara bertahap dan terukur.

Perjanjian Kinerja tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024, dokumen perjanjian kinerja dibuat secara berjenjang pada eselon II, III dan IV.

2.2. Rencana Kinerja;

Rencana kerja menjabarkan sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagi kegiatan selama tahun 2024. Rencana Kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapainya dalam tahun 2024.

Penetapan indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pasca tingkat kegiatan, didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian tujuan pada tahun yang bersangkutan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2024 seperti pada table berikut ini :

Tabel 2.9
PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN (ESELON II)
TAHUN 2024

Untuk merealisasikan kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Utara memperoleh alokasi pagu anggaran untuk belanja Operasional sebesar Rp 57.212.607.917; setelah perubahan menjadi Rp. 57.320.873.125;- Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selanjutnya diturunkan pada Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV dengan rincian sebagai berikut :

N O	SASARAN STRSTEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T 2024	PROGRAM	ANGGARAN 2024	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatny a Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	60	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	3.200.921.240	
2	Meningkatny a kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi politik, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Desa yang Bebas Potensi Kerawanan Konflik Sosial	79,6	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan	1.827.695.577	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilukada		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.	50.779.799.600	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

				Pogram Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n.	151.738.900	
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	199.999.600	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.052.453.000	
	JUMLAH ANGGARAN				57.212.607.917	

Tabel 2.10
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS (ESELON III)
TAHUN 2024

N O	SASARAN PROGRAM/KEGIAT AN	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN	TAR GET 2024	PROGRAM/KEGI ATAN	ANGGARAN 2024	KE T.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya SDM Dan Sarana Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas Kesbangpol	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.200.921.240	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi	Tingkat Konsistnsi Perencanaan Perangkat Daerah (%)	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.501.000	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

	Meningkatnya Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Serta Pelaporan Keuangan Berkala Badan Kesbangpol	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (%)	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.813.732.340	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Badan Kesbangpol	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181.257.000	
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Badan kesbangpol	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah (%)	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	684.474.600	
	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah (%)	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.028.300	
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (%)	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.928.000	
	TOTAL ANGGARAN				3.200.921.240	

Tabel 2.11

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG
BINA IDIOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA
(ESELON III) TAHUN 2024

N O	SASARAN PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR PROGRAM/K EGIATAN	TAR GET 2024	PROGRAM/KE GIATAN	ANGGARAN 2024	KET .
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan.	1.827.695.577	
1 a	Meningkatnya Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila Dan karakter Bangsa.	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	1.827.695.577	
	TOTAL ANGGARAN				1.827.695.577	

Tabel 2.12

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(ESELON III) TAHUN 2024

N O	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGI ATAN	TARG ET 2024	PROGRAM/K EGIATAN	ANGGARAN 2024	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	80	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.	50.779.799.600	
1 a	Meningkatnya Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Politik.	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	80	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	50.779.799.600	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

				Pemantauan Situasi Politik		
	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN				50.779.799.600	
2	Terlaksana nya Pemberday aan Dan Pengawasa n Organisasi Kemasyara katan	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	80	Pogram Pemberdayaa n Dan Pengawasan Organisasi Kemasyaraka tan	151.738.900	
2 a	Meningkatn ya Kebijakan Teknis Di Bidang Ormas.	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaa n dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakat an.	151.738.900	
	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN				151.738.900	
3	Terlaksana Pembinaan Dan Pengemba ngan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	80	Program Pembinaan Dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	199.999.600	
3 a	Meningkatn ya Kebijakan Teknis Di Bidang Ketahanan	Persentasi Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	80	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang	199.999.600	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

	Ekonomi Sosial Dan Budaya.	Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.		Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN				199.999.600	
	TOTAL ANGGARAN KEGIATAN				51.131.538.100	

Tabel 2.13

PERJANJIAN KINERJA PERENCANAAN AHLI MUDA
BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
(ESELON III) TAHUN 2024

N O	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET 2024	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2024	KE T.
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	80	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.052.453.000	
1 a	Meningkatnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Konflik Sosial.	Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial	80	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial,	1.052.453.000	
	TOTAL ANGGARAN				1.052.453.000	

Tabel 2.14
PERJANJIAN KINERJA PERENCANAAN AHLI MUDA
TAHUN 2024

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.400	
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.500.600	
3	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	3.500.000	
4	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	
5	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dok	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.500.000	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

		Perubahan DPA-SKPD				
6	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	
7	Tersusunnya laporan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN					28.501.000	

Tabel 2.15
PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
TAHUN 2024

N O	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2024	SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan.	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.813.732.340	
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	
	TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN				1.813.732.340	

Tabel 2.16
PERJANJIAN KINERJA UMUM DAN KEPEGAWAIAN
(ESELON IV) TAHUN 2024

N O	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET 2024	SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 pkt	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.517.000	
2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 OK	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	147.740.000	
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	10 pkt	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.004.300	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

4	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.004.300	
5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	
6	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.466.000	
8	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000	
9	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.900.000	
10	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.128.300	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

1 1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara pajaknya	1 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	190.770.000	
1 2	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.158.000	
	JUMLAH ANGGARAN				1.358.687.900	

Tabel 2.17
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BIDANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
(ESELON IV) TAHUN 2024

N O	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TAR GET 2024	SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	KE T.
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang Ormas.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 OK	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	151.738.900	
	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN				151.738.900	
2	Tersedianya Dokumen Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;	1 Dok.	Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;	199.999.600	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

	JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	199.999.600	
	TOTAL ANGGARAN SUB KEGIATAN	351.738.500	

Tabel 2.18
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BIDANG
PENANGANAN KONFLIK
(ESELON IV) TAHUN 2024

N O	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGE T 2024	SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	K E T.
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Kegiatan Di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	14 Orang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	591.039.000	
2	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	12 Orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	185.485.300	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

	kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah					
3	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik didaerah	1 Laporan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	275.928.700	
	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN				1.052.453.000	

Tabel 2.19
PERJANJIAN KINERJA ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
TAHUN 2024

N O	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGE T 2024	SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2024	K E T.
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Kegiatan Di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	14 Orang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	591.039.000	
2	Terlaksananya Koordinasi Di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	12 Orang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	185.485.300	
3	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang	1 Laporan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,	275.928.700	

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

		asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembangan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		
	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN				1.052.453.00 0	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Halmahera Utara merupakan bagian dari implementasi SAKIP di Badan Kesbangpol. Penyajian informasi kinerja dalam LKj Badan Kesbangpol didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2024 yang telah ditetapkan kemudian diukur dan disajikan dalam laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3.1 Capaian Kinerja;

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.20
SKALA ORDINAL

No	Jumlah Nilai	Kategori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Berhasil
3	55% s/d 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

3.2. Efisiensi Program Dan Pendanaan;

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2024 yang telah dianggarkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.21
Efisien program dan pendanaan

No	Jumlah Nilai	Kategori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Berhasil
3	55% s/d 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja Badan Kesbangpol.

3.3. Analisa Pencapaian Kinerja Program Serta Pendanaan;

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan mengukur indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

Tabel 3.22
Rekapan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Peran gkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	S a t u a n	Tar get Kin erj a	Real isasi Kine rja	Ting kat Cap aia n Kin erja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ting kat Capai an Keuan gan (%)	Perma salaha n	Solusi	Tindak Lanjut Rekom endasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.01	Unsur Pelayanan Umum	Badan Kesbangpol	1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	%	100,00	61,37	61,37	3.309.186.448,00	1.897.717.244,00	57,35			
1.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tingkat konsistensi perencanaan	%	100	87,50	87,50	28.501.000,00	3.053.600,00	10,71			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

			Anggaran 2023	Perangka t Daerah	perangka t daerah										
1.2. 01. 1			2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023	Penyusu nan Dokume n Perencan aan Perangka t Daerah	Jumlah Dokume n Perencan aan Perangka t Daerah	D o k	5	5	100 ,00	6.000.40 0	478.300	7,97			
1.2. 01. 2				Koordina si Dan Penyusu nan Dokume n RKA SKPD	Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusu nan Dokume n RKA- SKPD	D o k	1	1	100 ,00	3.500.60 0	980.600	28,01			
1.2. 01. 3			Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor ... Tahun 2023 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran	Koordina si Dan Penyusu nan Dokume n Perubah an RKA SKPD	Jumlah Dokume n Perubah an RKA- SKPD dan Laporan Hasil	D o k	1	1	100 ,00	3.500.00 0		0,00			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

			Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
1.2.01.4				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	100,00	3.500.000	0	0,00		
1.2.01.5				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	1	1	100,00	3.500.000	1.594.700	45,56		

2024

[illegible]

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

1.2.02				Administ rasi Keuanga n Perangka ta Daerah	Tingkat realisasi pelaksan aan anggaran perangka t daerah	%	100	31,3 6	31, 36	1.951.99 7.548	1.468.92 9.644	75,25			
1.2.02.1				Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah Orang yang Menerim a Gaji dan Tunjanga n ASN	O B	520	252	48, 46	1.951.99 7.548	1.468.92 9.644	75,25	Pencapa ian kinerja untuk sub kegiatan ini tidak tercapai dikaren akan alokasi untuk belanja tdk terrealis asi	Alokasi belanja TPP yg suda dianggar kan diharapk an dapat direalisas ikan sesui dengan regulasi	
1.2.05				Administr asi Kepegawa ian Perangkat Daerah	Cakupan Administr asi Kepegawa ian Perangkat Daerah	%	100	0	0,0 0	181.257. 000	33.517.0 00	18,49			
1.2.05.2				Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an	P k t	20	0	0,0 0	33.517.0 00	33.517.0 00	100,0 0			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

1.2. 011				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksanaan kegiatan Diklat	O / K	3	0	0,00	147.740.000	0	0,00			
1.2. 06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah (%)	%	100	80,00	80,00	654.474.600,00	298.726.000,00	45,64			
1.2. 06. 2			3. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	P k t	7	0	0,00	215.004.300	1.300.000	0,60			
1.2. 06. 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	P k t	1	1	100,00	15.004.300	4.890.000	32,59			
1.2. 06. 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	L a p .	1	1	100,00	10.000.000	2.800.000	28,00			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

				g-undangan	Perundan g-Undangan yang Disediakan										
1.2.16.8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	L a p	1	1	100,00	30.000.000	9.650.000	32,17			
1.2.16.9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	L a p	1	1	100,00	384.466.000	280.086.000	72,85			
1.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (%)	%	100	100	100,00	175.028.300,00	26.591.000,00	15,19			
1.2.08.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	L a p	1	1	100,00	100.000.000,00	20.856.000,00	20,86			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

1.2. 08. 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	L a p	1	1	100 ,00	9.900.00 0,00	2.100.00 0,00	21,21			
1.2. 08. 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	L a p	1	1	100 ,00	65.128.3 00,00	3.635.00 0,00	5,58			
1.2. 09. 2				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (%)	%	100	100	100 ,00	317.928. 000,00	66.900.0 00,00	21,04			
1.2. 09. 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	U n i t	1	1,00	100 ,00	190.770. 000,00	62.700.0 00,00	32,87			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

				aan, dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau kendaraa n Dinas Jabatan	atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajaknya										
1.2. 09. 2				Penyediaa n Jasa Pemeliha aan, Biaya Pemeliha aan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinann ya	U n i t	1	1,00	100 ,00	127.158. 000,00	4.200.00 0,00	3,30			
2.2. 01				Program Penguata n Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsa an	Persentas e Kebijakan Teknis dan pemantap an pelaksana an Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsa an	%	100	50	50, 00	1.827.69 5.577,00	1.581.48 9.077,00	86,53			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

2.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	50,00	50,00	1.827.695.577,00	1.581.489.077,00	86,53			
0003				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	30	30	100,00	1.364.868.477,00	1.364.868.077,00	100,00			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

000 4				Pelaksana an Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsa an, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pe mbauran Kebangsa an, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsa an	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsa an, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaura n Kebangsa an, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsa an	O r g	10	10	100 ,00	407.747. 100,00	216.621. 000,00	53,13			
----------	--	--	--	---	--	-------------	----	----	------------	--------------------	--------------------	-------	--	--	--

2024

[illegible]

3.2.01				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya politik.	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100	56,25	56,25	2.329.206.600,00	1.360.099.500,00	58,39			
--------	--	--	--	---	---	---	-----	-------	-------	------------------	------------------	-------	--	--	--

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

3.2. 01. 1				Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	%	100	56,25	56,25	2.329.206.600,00	1.360.099.500,00	58,39			
------------------	--	--	--	---	--	---	-----	-------	-------	------------------	------------------	-------	--	--	--

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

3.2. 01. 2				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	D o k .	1	1	100 ,00	135.775. 000,00		0,00			
------------------	--	--	--	---	--	------------------	---	---	------------	--------------------	--	------	--	--	--

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

3.2. 01. 3				Pelaksana an Kebijakan Di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokras i, Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantau an Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksana an Kebijakan di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokras i, Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik di Daerah	O r g	20	5	25, 00	1.399.99 9.500,00	1.255.09 9.500,00	89,65	Kegiat an yang dilaku kan tdk sesuai indikat or kinerja (Outp ut)	Perenc anaan dan pengan ggaran tahun berikut nya sesuai dengan indikat or kinerja
------------------	--	--	--	--	--	-------------	----	---	-----------	----------------------	----------------------	-------	--	---

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

3.2. 01. 4				Pelaksana an Koordinasi Di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokras i, Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantau an Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Pen ingkatan Demokras i, Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik di Daerah	O r g	12	12	100 ,00	729.999. 700,00	105.000. 000,00	14,38			
------------------	--	--	--	---	---	-------------	----	----	------------	--------------------	--------------------	-------	--	--	--

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

3.2. 01. 5				Pelaksana an Monitorin g, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokras i, Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantau an Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitorin g, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokras i, Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han, Perwakila n dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik di Daerah	L a p	1	0	0,0 0	63.432.4 00,00	0	0,00			
------------------	--	--	--	---	--	-------------	---	---	----------	-------------------	---	------	--	--	--

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

4.2. 01				Pogram Pemberda yaan Dan Pengawas an Organisas i Kemasyar akatan.	Persentas e keterlaksa naan fasilitasi pemberda yaan dan pengawas an organisasi kemasyar akatan	%	100	0	0,0 0	151.738.900,00	0	0,00			
4.2. 01				Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Pemberda yaan dan Pengawas an Organisas i Kemasyar akatan	Persentas e Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Pemberda yaan dan Pengawas an Organisas i Kemasyar akatan	%	100	0	0,0 0	151.738.900,00	0	0,00			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

4.2. 01. 4				Pelaksana an Koordinasi di Bidang Pendaftar an Ormas, Pemberda yaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas an Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftar an Ormas, Pemberda yaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas an Ormas dan Ormas Asing di Daerah	O r g	3	0	0,0 0	151.738. 900,00	0	0,00			
5.2. 01				Program Pembinaa n Dan Pengemb angan Ketahana n Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentas e keterlaksa naan fasilitasi pembinaa n dan pengemb angan ketahana n ekonomi, sosial, dan budaya	%	100	100	100 ,00	199.999. 600,00	-	0,00			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

5.2. 01				Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.	%	100	100	100,00	199.999.600,00	-	0,00			
5.2. 01. 4				Penyusunan Bahan perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonom, Sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalagunaan Narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan	Jumlah kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Org	30	30	100,00	199.999.600,00		0,00			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

				an di Daerah.											
6.2.01				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan	%	100	44,44	44,44	1.052.451.000,00	468.185.300,00	44,49			

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

					an konflik sosial											
6.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial,	Persentasi Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemetaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	%	100	44,44	44,44	1.052.451.000,00	468.185.300,00	44,49				

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

6.2. 01. 3				Pelaksana an Kebijakan di Bidang kewaspada an dini, kerjasama intelijen, pemantau an orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspada an antar negara, fasilitasi kelemban gan bidang kewaspada an serta penangan an konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksana an di Bidang kewaspada an dini, kerjasama intelijen, pemantau an orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspada an antar negara, fasilitasi kelemban gan bidang kewaspada an serta penangan an konflik di daerah	O r g	14	14	100 ,00	591.039. 000,00	270.700. 000,00	45,80			
------------------	--	--	--	---	--	-------------	----	----	------------	--------------------	--------------------	-------	--	--	--

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

6.2. 01. 4				Pelaksana an Koordinasi di Bidang kewaspad aan dini, kerjasama intelijen, pemantau an orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspad aan antar negara, fasilitasi kelemban gan bidang kewaspad aan serta penangan an konflik didaerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang kewaspad aan dini, kerjasama intelijen, pemantau an orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspad aan antar negara, fasilitasi kelemban gan bidang kewaspad aan serta penangan an konflik didaerah	O r g	12	4	33, 33	185.485. 300,00	185.485. 300,00	100,0 0			
------------------	--	--	--	---	--	-------------	----	---	-----------	--------------------	--------------------	------------	--	--	--

LAPORAN KINERJA (LKj)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2024

6.2. 01. 5				Pelaksana an Monitorin g, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspad aan dini, kerjasama intelijen, pemantau an orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspad aan antar negara, fasilitasi kelemban gan bidang kewaspad aan serta penangan an konflik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitorin g, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang kewaspad aan dini, kerjasama intelijen, pemantau an orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspad aan antar negara, fasilitasi kelemban gan bidang kewaspad aan serta penangan an konflik di daerah	L a p .	1	0	0,0 0	275.926. 700,00	12.000.0 00,00	4,35				
Jumlah Total										61, 37	8.870.27 8.125,00	5.307.49 1.121,00	59,83			

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.23
Perbandingan Realiasi dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran

SASARAN	INDIKATOR UTAMA	CAPAIAN 2023	2023			2024			TARGET AKHIR RENSTRA 2024	CAPAIAN S/D 2023 TERHADAP DAP 2024
			TARGET	REALISASI	REALISASI CAPAIAN	TARGET	REALISASI	REALISASI CAPAIAN		
Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Presentase Desa yang Bebas Potensi Kerawanan Konflik Sosial	126,73	78,1	98,98		79,6	101	101	80	144,33
Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	cc	80

Akuntabilitas keuangan anggaran yang diperuntuhkan Pada APBD tahun 2024 untuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp. 57.212.607.917 yang diperuntukan untuk Belanja Operasional sebesar Rp. 57.320.873.125;sedangka pada APBD-P tahun 2023 total anggaran menjadi Rp. 18.172.750.272; dari total anggaran tersebut yang terrealisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 29.243.291.121; atau dengan presentase 51,02%. Secara rinci dapat diuraikan bahwa realisasi Besaran alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada realisasi anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 3.834.361.477;- data ini sesuai Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (SUMBER DATA LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFENITIF PERKEGIATAN).

BAB IV

P E N U T U P

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara, telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran strategisnya. Secara umum realisasi berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai sesuai dengan target, sasaran kinerja sebesar 78,10% atau kinerja kriteria Tinggi. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa, namun

demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Tobelo, 1 Maret 2023
Kepala Badan Kesbangpol



Drs. ANWAR S. KABALMAY

PEMBINA Tk.I IV/b
NIP.196802021988031006